KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1003 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2020-2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi yang berdampak pada peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu menyelenggarakan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan secara terencana dan terarah;

b. bahwa agar penyelenggaraan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan, perlu menyusun road map reformasi birokrasi Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MENETAPKAN:

Memutuskan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 merupakan panduan dalam melaksanakan rencana kerja tahunan atau rencana aksi reformasi birokrasi serta mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1003 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

No	Program / Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Manajemen Perubahan	Meningkatnya komitmen dalam melakukan Reformasi Birokrasi	Penetapan Pimpinan Tinggi Madya sebagai ketua pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja	√	√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap pegawai dilingkungan unit kerja oleh pimpinan unit kerja	√	√	√	√	√	Pimpinan Tinggi Madya
			Menerapkan prinsip budaya kerja kementerian perdagangan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan pada setiap pegawai dilingkungan unit kerjanya	√	√	√	√	√	Pimpinan Tinggi Madya
		Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi	Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model	√	√	√	√	√	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan
			Melakukan pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0			√	√	√	Pusat Data dan Sistem Informasi

6

No	Program / Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan RB (Rencana Kerja Tahunan)	√	√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan	Penerapan Manajemen Resiko	√	√	√	√	√	Inspektorat Jenderal
2.	Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi Pemerintah (menghilangkan *overlapping* peraturan);	√	√	√	√	√	Biro Hukum
			Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;		√	√	√	√	Biro Hukum
			Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Instansi Pemerintah	√	√	√	√	√	Biro Hukum
			Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	√	√	√	√	√	Biro Hukum
			Evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.		√	√	√	√	Biro Hukum

No	Program / Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Penataan Organisasi/ Kelembagaan	Terwujudnya kebijakan tentang manajemen jabatan yang mendukung pelaksanaan manajemen SDM	*Asessment* organisasi berbasis kinerja				√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		Terwujudnya Kementerian Perdagangan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan bersinergi dengan lembaga lain	Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;				√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.		√				Biro Organisasi dan Kepegawaian
4.	Penataan Tata Laksana	Meningkatnya penerapan sistem berbasis *e-government* (indeks SPBE)	Penerapan Tata Kelola SPBE	√					Pusat Data dan Sistem Informasi
			Penerapan Manajemen SPBE	√					Pusat Data dan Sistem Informasi
			Penerapan Layanan SPBE	√					Pusat Data dan Sistem Informasi
			Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan	√					Pusat Data dan Sistem Informasi
			Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)	√					Biro Umum
		Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan di Kementerian Perdagangan (indeks pengawasan kearsipan)	Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan	√	√	√	√	√	Unit Kerja
			Mengimplementasikan digitalisasi arsip		√	√	√	√	Unit Kerja
		Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa secara transparansi (indeks pengelolaan keuangan) (indek pengelolaan Aset)	Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	√	√	√	√	√	Biro Keuangan

No	Program / Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
		Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKP) dapat diterapkan di Kementerian Perdagangan	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan	√	√	√	√	√	Biro Umum
			Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	√	√	√	√	√	Biro Hubungan Masyarakat
		Terlaksananya kegiatan dilingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan Sistem dan Prosedur kerja	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;		√			√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Penyelarasan Proses bisnis dan SOP		√			√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
5	Sistem Manajemen SDM	pelaksanaan sistem promosi secara terbuka sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Perumusan dan penetapan kebijakan kebijakan sistem promosi secara terbuka		√				Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Evaluasi terhadap Kebijakan sistem promosi secara terbuka di lingkungan Kementerian Perdagangan		√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		pelaksanaan penilaian kinerja pegawai kementerian perdagangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai	√					Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Penerapan kebijakan penilaian kinerja pegawai	√	√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		pelaksanaan penilaian kinerja pegawai kementerian perdagangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Monitoring dan evaluasikebijakan penilaian kinerja pegawai		√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Program / Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
		terlaksananya skema *reward dan punishmen*t bagi seluruh pegawai ASN dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	Perumusan dan penetapan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja		√				Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Penerapan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja		√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasikebijakan reward dan punishment berbasis kinerja		√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		Pegawai ASN yang kompeten	Penyempurnaan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi	√					Biro Organisasi dan Kepegawaian
			rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi	√	√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi	√	√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		kaderisasi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN		√				Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN			√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN				√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Program / Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
		tersedianya data *gap competency* para pemangku jabatan	Perumusan dan penetapan kebijakan Pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan		√	√			Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Penerapan kebijakan Pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan			√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasikebijakan Pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan				√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		Implementasi sistem informasi ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi ASN	√	√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Penerapan kebijakan sistem informasi ASN	√	√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		tercapainya pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk mewujudkan pegawai ASN yang berkinerja	Perumusan dan penetapan kebijakan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja	√					Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Program / Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
		tercapainya pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk mewujudkan pegawai ASN yang berkinerja	Penerapan kebijakan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja		√				Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasikebijakan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja		√				Biro Organisasi dan Kepegawaian
		lulusan diklat yang kompeten dan memiliki integritas	Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan	√					Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Penerapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan	√	√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian kualitas diklat di lingkungan Kementerian Perdagangan	√	√	√	√	√	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		pemanfaatan assessment center untuk pengembangan dan penilaian pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan	Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *assessment center*		√				Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Penerapan dan pemanfaatan *assessment center*		√				Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Program / Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Monitoring dan evaluasikebijakan pemanfaatan assessment center		√				Biro Organisasi dan Kepegawaian
		pejabat yang kompeten	Penerapan sistem promosi secara terbuka	√					Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasipenerapan sistem promosi secara terbuka	√					Biro Organisasi dan Kepegawaian
		transparansi jalur karier pegawai ASN	Penyempurnaan kebijakan pola karier pegawai ASN			√			Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Penerapan kebijakan pola karier pegawai ASN			√			Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasikebijakan pola karier pegawai ASN				√		Biro Organisasi dan Kepegawaian
		terciptanya *data base* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN yang dapat digunakan dalam manajemen SDM	Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan *data base* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN			√			Biro Organisasi dan Kepegawaian
			pemanfaatan dan pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN			√			Biro Organisasi dan Kepegawaian
			Monitoring dan evaluasipemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN				√		Biro Organisasi dan Kepegawaian

No	Program / Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
6	Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*collaborative and crosscutting*);	√					- Inspektorat Jenderal - Biro Keuangan - Biro Perencanaan
		Tertelusurnya/ tercerminnya kinerja organisasi dengan kinerja individu	Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasikinerja, serta pelaporan kinerja	√					Biro Perencanaan
		Terukurnya kinerja organisasi yang didukung oleh kinerja individu	Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*);	√					- Biro Keuangan - Biro Perencanaan - Pusat Penanganan Isu Strategis - Biro Organisasi dan Kepegawaian
		Terukur dan tertelusurnya seluruh kegiatan organisasi dengan adanya IKP	Pelaksanaan monitoring dan evaluasikinerja secara berkala;	√					- Biro Keuangan - Biro Perencanaan
		Keterbukaan informasi terkait pelaporan kinerja Kementerian	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;	√					Biro Perencanaan
		Tertelusurnya proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;	√					- Biro Keuangan - Biro Perencanaan

No	Program / Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
		Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian	Menyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan	√					Biro Keuangan
7	Pengawasan	Persentase meningkatnya jumlah pegawai yang memahami SPIP	Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;	√					Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Jumlah Auditor bersertifikat Ahli	Meningkatkan Kompetensi APIP	√					Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Jumlah Rekomendasi strategis untuk bahan masukan Pimpinan	Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)	√					Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Persentase Hasil Pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti	Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	√					Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Menurunnya risiko/tingkat kesalahan yang disebabkan kesalahan pengelolaan barang dan jasa	Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	√					Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Jumlah unit yang ditetapkan memenuhi kategori ZI	Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	√					Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Indeks anti Gratifikasi	Penguatan Pengendalian gratifikasi	√					Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Tingkat Kepuasan penanganan pengaduan masyarakat yang tertangani	Penguatan penganganan pengaduan dan komplain	√					Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Program / Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
		Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan	Penguatan efektivitas manajemen risiko	√					Sekretariat Inspektorat Jenderal
		Persentase jumlah aduan lewat WBS yang tertangani	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	√					Sekretariat Inspektorat Jenderal
8	Pelayanan Publik	Kemudahan akses dokumen informasi publik	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);	√					Unit Pelayanan Publik
			Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan						Biro Hubungan Masyarakat
			Menyelesaikan pengaduan sesuai SOP						Biro Hubungan Masyarakat
			Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;						Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

No	Program / Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Pelaksanaan					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Penciptaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;						Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
			Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;						Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;						Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
			Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.						Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS SUPARMANTO